



**POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SENDEN
KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Menyelesaikan Program Studi Strata 1
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**

Oleh

EKA WULANDARI

3301412015

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : **SENIN**
Tanggal : **13 JUNI 2016**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Drs. Slamet Sumarto, M. Pd
NIP. 196101271986011001

Dosen Pembimbing II

Drs. Sunarto, S.H., M.Si
NIP: 196306121986011002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan, M.Si
NIP: 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Panitia Sidang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

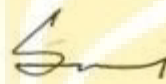
Hari : SELASA
Tanggal : 28 JUNI 2016

Penguji I



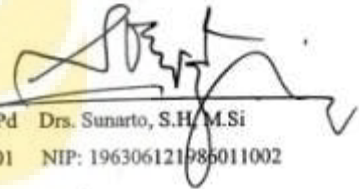
Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si
NIP. 197610112006041002

Penguji II



Drs. Slamet Sumarto, M. Pd
NIP. 196101271986011001

Penguji III



Drs. Sunarto, S.H, M.Si
NIP: 196306121986011002

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Soehatul Mustofa MA
NIP: 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 13 Juni 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eka Wulandari'.

Eka Wulandari

NIM. 3301412015

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha

PERSEMBAHAN

Didedikasikan Kepada :

1. Bapak Kasri dan Ibu Sukatmi yang senantiasa menguntai do'a dan dukungan serta kasih sayang yang luar biasa.
2. Keluargaku Dwi Alfina Damayanti dan Dias Febritama Putra yang memberikan semangat baik secara langsung maupaun tidak langsung.
3. Fauzan, Lisa, Leni, Suci, Malinda, khakimatul, Yeni, Bayu, Sila, Suhadak terimakasih atas dukungan semangat, kebersamaan dan bantuan yang diberikan kepada saya dalam menyusun Skripsi.
4. Teman-teman PKn angkatan 2012, teman-teman sebimbingan, dan KKN SUPER atas do'a dan kebersamaannya selama di bangku kuliah.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

SARI

Wulandari, Eka. 2016. *Pola Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Selamat Sumarto, M.Pd. Pembimbing II Drs. Sunarto S.H. M.Si.

Kata Kunci: Pola, Kepemimpinan, Kepala Desa, Perempuan, Meningkatkan, Pembangunan.

Kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan tampaknya semakin meningkat, baik dibidang politik, pendidikan, maupun kesehatan. Perempuan yang berperan dalam pembangunan tidak hanya perempuan yang ada dikota, melainkan perempuan yang berada diberbagai lini kehidupan juga ikut berperan. Salah satunya yaitu kepala desa, tidak sedikit kepala desa perempuan yang lebih berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan kepala desa perempuan dalam memimpin tidak lepas dari pola kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin dalam segala hal.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pola kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, (2) bagaimana kepemimpinan kepala Desa perempuan dalam pelayanan kepada masyarakat di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, (3) bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala Desa perempuan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: Kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi dan sumber. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pola kepemimpinan yang diterapkan kepala Desa Senden adalah pola kepemimpinan yang demokratis hal ini terlihat dari cara kepala Desa dalam merencanakan, melaksanakan, memecahkan suatu permasalahan dan membuat peraturan dilaksanakan berdasarkan musyawarah bersama (2) kepemimpinan kepala desa perempuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan tidak membedakan pelayanan yang diberikan hal ini terlihat dari cara kepemimpinana kepala desa dalam melayani masyarakat dilakukan secara terbuka (3) tanggapan masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala Desa perempuan sebagian besar masyarakat Desa Senden memberikan tanggapan yang positif terhadap kepemimpinan kepala Desa perempuan di Desa Senden. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat Desa Senden dalam menjalankan program pembangunan dan kegiatan yang ada di Desa Senden. Faktor-faktor penghambat kepemimpinan Kepala Desa perempuan sebagai berikut: kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang di selenggarakan di Desa Senden dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dalam meminta dan menerima pelayanan.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagi Kepala Desa, diharapkan kepala desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang

ada di Desa Senden dengan cara memberikan penghargaan kepada setiap dusun yang partisipasi masyarakatnya tinggi (2) bagi masyarakat, diharapkan dapat menjalin kerjasama antar warga dan pemerintah desa atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di dalamnya agar semua keinginan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan cara mengikuti musyawarah yang diadakan di Desa. Masyarakat diharapkan lebih memahami dan ikut serta berpartisipasi terhadap kegiatan yang ada di Desa dalam kegiatan pembangunan khususnya demi kemajuan Desa Senden.



ABSTRACT

Wulandari, Eka. 2016. *The System of Woman's Leadership as the Headman in Improving Senden Village Development in the District Selo, Boyolali Regency.* A Final Project, Politics and Citizenship Department. Faculty of Social Science. Semarang State University. Supervisor I Drs. Selamat Sumarto, M.Pd. Supervisor II Drs. Sunarto SH M.Sc.

Key Words : System, Leadership, Headman, Women, Improving, Development.

The status and role of woman in development apparently increasing, either in politics, education or health. Women who play a role in the development not only the woman who are in the city, but the women who are in the various aspects of life also have a role. One of them is the headman, not a few of women Headman who are more successful in their duties. The success of women Headman in lead cannot be separated from the leadership system that was applied by a leader in every way.

Based on the background above, the research problems are : (1) how the leadership system of women Headman in the implementation of development programs in the Senden village, Selo district, Boyolali regency, (2) how the leadership of women Headman in the public service in the Senden village, Selo district, Boyolali regency, (3) how the public response to the system of the leadership of women Headman in the Senden village, Selo district, Boyolali regency.

This study uses qualitative research methods with descriptive qualitative approach. The informant sources of primary data in this study include : the Headman, village administrator, public figure and community in the Senden village, Selo district, Boyolali regency. The collection of data through interviews, observasion and documentation, data language test using triangulation methods and sources. Data analysis included data collection, data reduction, data presentation and conclusion also verification.

The result of this study indicate that (1) leadership that was applied to the Senden Headman is democratics leadership system it an be seen from the Headman's way in making a plan, implement, solve a problem and make the rules impleted by discussion (2) the leadership of women Headman in provide some services to the public is given is good as seen from the leadership way of women Headman in serving the community done openly by not distinguishing the services (3) the public response to the leadership system of women Headman most of the Senden community give positively answer to the women Headman leadership in Senden village. This is evidenced by the participation of Senden community in running development programs and activities in the Senden village. Factors inhibiting the leadership of women Headman as follow: lack of community participation in development activities which is held in Senden village and lack of community understanding level in demanding and receiving the service

Suggestion put forward in this study as follows: (1) for the Headman, is expected to the Headman may increase community participation in activities in the Senden village by giving awards to the part of the village that give high participation (2) for the community, is expected to establish cooperation between villagers and village government or social institutions in it so that all the wishes of the community may be conveyed by following the deliberations held in the village. Community are expected to be more understand and participating to the activities which is held in the village in development activities, especially for the progress of Senden village.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah member rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pola Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

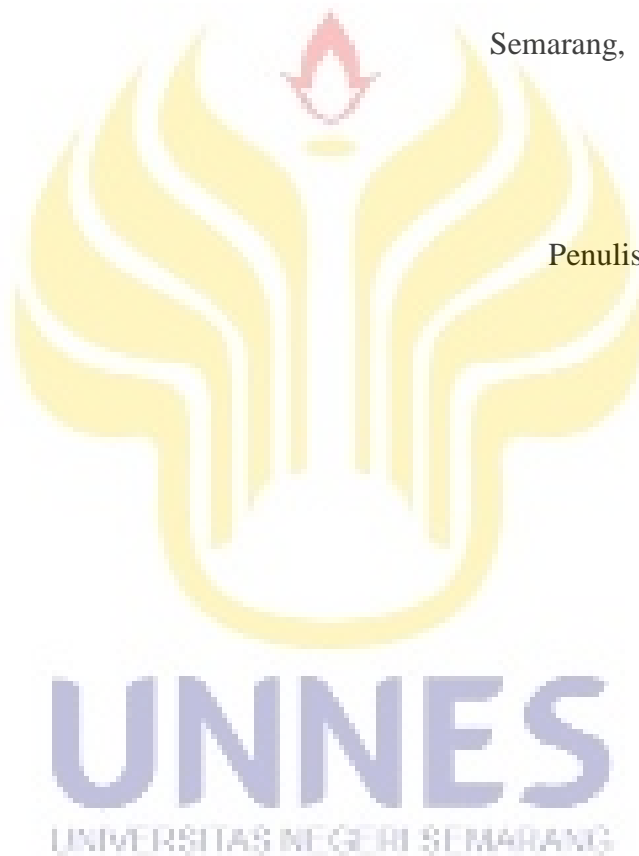
1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA. Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si. Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Drs. Slamet Sumarto M.Pd. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Sunarto S.H., M.Si. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si. Dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala desa Senden, perangkat desa, dan masyarakat desa Senden kecamatan Selo kabupaten Boyolali yang telah bekerjasama dan mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Keluarga tercinta, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan.

9. Semua pihak dan instansi terkait yang telah membantu selama dilaksanakannya penelitian sampai selesai penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2016

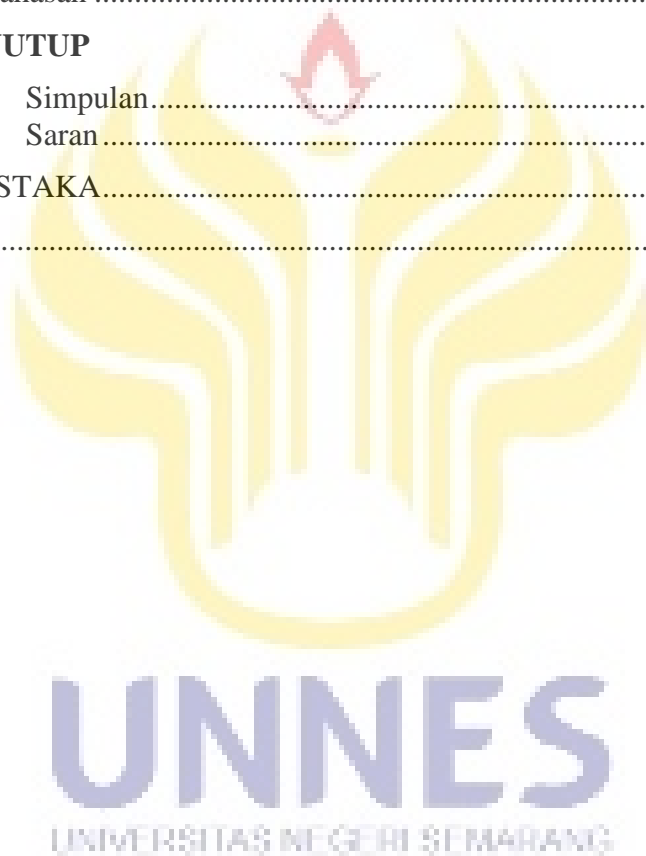
Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepemimpinan.....	12
B. Pembangunan.....	32
C. Kepala Desa	35
D. Pelayanan.....	39
E. Hasil Penelitian yang Relevan	45
F. Kerangka Berpikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelittian.....	48
B. Latar Penelitian	48

C. Fokus Penelitian.....	48
D. Sumber Data Penelitian	49
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	50
F. Keabsahan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	56
B. Pembahasan	88
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	91
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Rapat Rutin	64
Gambar 4.2 Pelayanan Masyarakat	77



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	47
Bagan 3.2 Interaktif Analisis.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	58
Tabel 4.2 Jumlah Pembangunan	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Penelitian	104
Lampiran 2 Surat Keterangan Melakukan Penelitian.....	105
Lampiran 3. Daftar Narasumber	106
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Kepala Desa	107
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Perangkat Desa.....	109
Lampiran 6. Pedoman Wawancara Masyarakat	111
Lampiran 7. Hasil Wawancara Ibu Sularsih.....	114
Lampiran 8. Hasil Wawancara Bapak Cipto	122
Lampiran 9. Hasil Wawancara Bapak Slamet.....	128
Lampiran 10. Reduksi Data.....	134



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat dilihat dari sosok pemimpin yang memimpin bangsa tersebut. Diera yang semakin maju ini pemimpin bukan hanya sebagai sebuah simbol saja, namun pemimpin harus memiliki kemampuan yang baik untuk dapat memimpin. Seorang pemimpin sekarang ini tidak hanya melekat pada sosok laki-laki saja, namun perempuan memiliki prioritas yang sama dan berhak menjadi seorang pemimpin bahkan perempuan cenderung menggunakan hatinuraninya untuk memimpin.

Kepemimpinan seorang perempuan sekarang ini bukan menjadi suatu hal yang aneh karena di Indonesia pemimpin bukan hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja namun perempuan juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan seorang perempuan sekarang ini bisa disejajarkan dengan kepemimpinan seorang laki-laki baik dalam kinerja maupun dalam melayani masyarakat. Perempuan yang mulanya hanya dipandang sebelah mata dan diragukan dalam memimpin sekarang dipandang positif oleh masyarakat.

Kepemimpinan merupakan faktor utama dalam menentukan suatu tujuan yang akan dicapai. Kepemimpinan adalah suatu alat atau proses untuk mempengaruhi orang agar bersedia melakukan suatu tindakan secara sukarela. Selain itu gaya dari seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja dari yang

dipimpin dalam artian seorang pemimpin akan menjadi panutan, maka dari itu seorang pemimpin harus menjadi panutan yang baik.

Pemimpin yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula baik dalam segi kepemimpinannya maupun keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Keberhasilan seorang pemimpin yang dapat dilihat secara langsung dan dapat dimanfaatkan semua masyarakat salah satunya dapat dilihat dari segi pembangunannya, pembangunan yang baik dan maju biasanya menjadi tolak ukur seorang pemimpin dikatakan berhasil dalam memimpin. Pembangunan yang diselenggarakan secara merata di seluruh wilayah menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dicapai seorang pemimpin.

Secara umum hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun masyarakat.

Pembangunan nasional harus diselenggarakan secara merata di seluruh wilayah negara. Pembangunan tersebut dititikberatkan di wilayah pedesaan karena bagaimanapun juga wilayah pedesaan masih sangat membutuhkan pembangunan

terutama dibidang infrastruktur. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka meletakkan landasan yang luas bagi perkembangan dan pertumbuhan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang luas.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang dilakukan disemua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang keberhasilan. Pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh kekuatan moral dan etiknya. Pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab semua masyarakat harus dijalankan secara merata mulai dari komponen terkecil yaitu pembangunan desa. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus menjadi pemeran aktif dalam pembangunan sesuai dengan keperluan. Keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya kesesuaian program, kemampuan masyarakat desa, peran serta pemerintah desa, dan pemimpin di desa tersebut.

Pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab perangkat desa namun partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai panutan masyarakat desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peran penting dalam meningkatkan pembangunan didesanya. Seorang pemimpin menjadi panutan yang sangat penting bagi masyarakat apalagi pemimpin yang menjadi panutan adalah perempuan maka masyarakat akan dengan mudah tersentuh dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Cara seorang memimpin akan menjadi tolak ukur seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai dalam proses pembangunan khususnya. Apabila partisipasi masyarakat sudah baik maka akan dengan mudah mencapai suatu keberhasilan dalam pembangunan, namun semua itu harus didorong dengan kemauan seseorang pemimpinnya. Oleh karena itu pemimpin harus memimpin masyarakat melalui pola kepemimpinan serta kebijakan-kebijakan yang sesuai dan demokratis.

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin yang baik harus senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pelayanan masyarakat pada dasarnya

adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perbedaan itu disebut dengan "*gender*". Meskipun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan, fungsi dan peran. Tetapi ada persamaan dalam hal kedudukan, baik laki-laki maupun perempuan yang sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Kedudukan sebagai subjek pembangunan, laki-laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Hak yang sama dibidang pendidikan misalnya, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu. Tentu tidaklah adil, jika dalam era yang seperti ini menomorduakan pendidikan bagi perempuan, apalagi jika anak perempuan mempunyai kecerdasan atau kemampuan maka sangat dianjurkan perempuan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

Pengembangan peran kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan sudah banyak dilakukan, bahkan sudah masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan. Sudah banyak kepala desa ataupun kepala kelurahan

di Indonesia yang disandang oleh kaum perempuan. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai “*manajer*” pemerintahan desa atau kelurahan, tentunya banyak hambatan, godaan dan tantangan yang harus dilalui oleh mereka. Namun demikian tidak sedikit kepala desa atau kepala kelurahan perempuan mencapai prestasi yang lebih berhasil ataupun gemilang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Hal tersebut misalnya disebabkan adanya dukungan kemampuan dalam hal pendidikan, pengalaman berorganisasi, dan motivasi dari kaum perempuan itu sendiri. Meskipun sudah banyak perempuan yang memiliki prestasi yang gemilang namun, perempuan sebagai istri masih dipandang sebagai pelayan suami dan mempunyai tugas untuk mengurus anak-anaknya, dapat dikatakan ruang gerak seorang perempuan masih sangatlah terbatas padahal perempuan boleh menjadi pemimpin selama perempuan tidak mengabaikan tugasnya dalam keluarga dan seijin suaminya.

Pemimpin perempuan dalam suatu desa bukan suatu hal yang aneh lagi, Desa Senden salah satunya merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan semenjak dua priode ini, Desa Senden terletak di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dengan mayoritas penduduk bercocok tanam. Desa Senden terdiri dari bermacam latar belakang profesi, pendidikan, dan memiliki kultur masyarakat desa yang kental dengan kegotongroyongan, dan keanekaragaman latar belakang ini menjadikan Desa Senden berpeluang untuk menjadi lebih maju.

Perbandingan kepemimpinan kepala Desa Senden sebelum dipimpin oleh kepala desa perempuan khususnya perbandingan dalam bidang pembangunan program pembangunan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2004-2009 selama

kepemimpinan kepala desa laki-laki diantaranya: pembuatan jalan alternatif penghubung dusun, pengasaran jalan di dusun 1 dan dusun 2, dan pembangunan balai desa. Sedangkan program pembangunan yang sudah berhasil dilaksanakan kepala desa perempuan di Desa Senden yang terpilih pada tahun 2009-2016 sudah banyak program pembangunan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2009-2013 program pembangunan yang terlaksana seperti pembangunan gedung efakuasi, rabat beton di dusun 1, 2, dan 4, penyemiran di dusun 1 dan 3, pembuatan penampungan air bersih setiap RT, jalur usaha tani, dan pembangunan gapura di setiap batas dusun. Pada tahun 2013-2016 program pembangunan yang berhasil dilaksanakan diantaranya: Rabat beton di RT 1 dan 2, Jalan usaha tani di setiap dusun, pengaspalan jalan di RW 2, penyemiran jalan di RW 5, pembangunan talok di RW 4, dan selokalisasi di semua dusun. Desa Senden juga menjadi desa pelopor sekecamatan Selo karena pembangunannya paling maju (*Sumber buku administrasi desa Senden tahun 2000-2016*).

Keberhasilan kepala desa perempuan di Desa Senden dalam melaksanakan program pembangunan tidak lepas dari dukungan yang diberikan keluarga. Sebagai seorang perempuan yang memiliki peran ganda sebagai seorang kepala desa dan juga ibu rumah tangga tentunya kepala desa akan mengalami kesulitan karena harus menjalankan tugasnya secara baik dan seimbang. Dalam hal ini kepala desa perempuan di Desa Senden mengutamakan tugasnya sebagai seorang kepala desa yang berkewajiban melayani masyarakat dan di sela-sela waktunya tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang melayani keluarganya.

Dilihat dari uraian di atas jelaslah bahwa kedudukan perempuan sebagai pemimpin tidak dapat dikesampingkan, harus diakui kemampuannya dan tidak dipandang sebelah mata. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peranan perempuan dalam pembangunan tampaknya harus mendapat porsi yang seimbang dengan kaum laki-laki. Pandangan masyarakat yang semula menganggap sosok perempuan yang hanya sebagai "*kanca wingking*" bagi laki-laki sudah mengalami perubahan. Bahwa kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi kehidupan publik mensyaratkan kualifikasi tersebut bilamana kesempatan dimungkinkan, akan tetapi dalam kenyataannya, kepemimpinan Kepala desa perempuan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali masih ada masyarakat yang meragukan kemampuannya karena seorang perempuan. Masyarakat di desa ini masih ada yang mendiskriminasi kepemimpinan kepala desa perempuan dengan kepala desa laki-laki, yang beranggapan bahwa pola dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan berbeda serta beranggapan bahwa laki-laki yang lebih pantas menjadi pemimpin dalam setiap bidang kehidupan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pola Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pelayanan kepada masyarakat di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala Desa perempuan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Agar kegiatan penelitian dapat terarah dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pelayanan kepada masyarakat di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala Desa perempuan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya tentang pola kepemimpinan kepala desa perempuan dalam meningkatkan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa, dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana kewajiban pemimpin dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pembangunan desa.

E. Batasan Istilah

Berdasarkan pemikiran di atas maka batasan yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pola

Pola merupakan suatu cara yang biasanya digunakan untuk menampilkan karakteristik dari seseorang. pola berkaitan dengan cara yang digunakan.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses dimana seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, namun tujuan mempengaruhi disini guna memperoleh sebuah tujuan dari proses kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan itu sendiri berarti memberi contoh

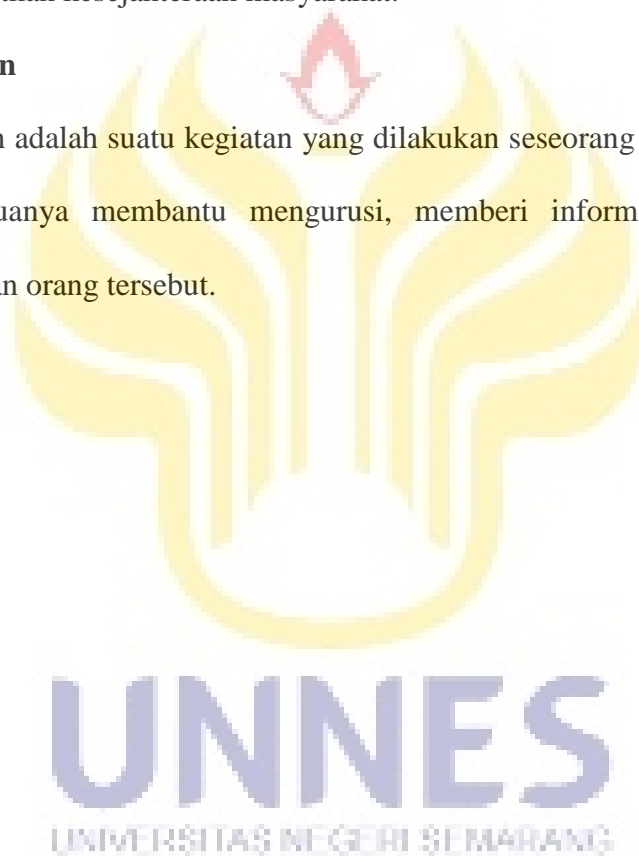
kepada pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi tersebut.

3. Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari suatu proses dan pencapaian untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dibidang infrastruktur, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang tujuannya membantu mengurus, memberi informasi dan apa yang dibutuhkan orang tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Orang lain tersebut bertindak-laku sebagaimana kehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial (Koentjaraningrat, 1967:181). Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai salah satu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Soekanto, 2001: 318-319).

Setiap lembaga organisasi kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan. Menurut Wahjosumijo (2003: 83) dalam praktek sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal mampu nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata itulah, kemudian muncul istilah kepemimpinan setelah melalui proses yang panjang.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada kemampuan untuk mempengaruhi, jadi kepemimpinan berarti kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang atau orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan sepenuh hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan (Sedarmayanti, 2007:111-112).

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis dan antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin ada relasi interpersonal. Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang guna melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan tertentu (Kartono, 2013:6).

Kepemimpinan adalah proses dimana seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, namun tujuan mempengaruhi disini guna memperoleh sebuah tujuan dari proses kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan itu sendiri berarti memberi contoh kepada pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi tersebut.

Pengertian kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk

memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi.

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu sukarela atau sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal yaitu: (1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan pen distribusi kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara (Rivai, 2006:3).

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Oleh karena itu, kepemimpinan pada hakikatnya adalah :

- a. Proses memberi contoh pemimpin kepada pengikutnya.

- b. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Kemampuan untuk memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang.
- d. Ada beberapa hal yang dilibatkan yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu (Rivai, 2006:3-4).

Dengan begitu pemimpin itu ada apabila terdapat kelompok atau suatu organisasi. Maka keberadaan pemimpin itu selalu ada ditengah-tengah kelompoknya anakbuah, bawahan dan rakyat (Kartono, 2013:6).

Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan.

Pada dasarnya kemampuan untuk memengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya.

2. Kriteria Kepemimpinan

Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria. Kriteria apa saja tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan apakah itu sifat kepribadiannya, ketrampilannya, bakatnya, sifat-sifatnya, atau kewenangan yang dimilikinya.

Upaya menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas mutu prilakunya, yang

dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinanya. Selanjutnya, George R. Terry (dalam Kartono, 2013: 47-50) menyebutkan sepuluh sifat pemimpin yang unggul, yaitu:

- a. Kekuatan, badaniah dan rohaniyah merupakan syarat pokok bagi pemimpin yang harus bekerja lama dan berat.
- b. Stabilitas emosi, pemimpin yang baik itu memiliki emosi yang stabil. Artinya tidak mudah marah, tersinggung, dan tidak meledak-ledak.
- c. Pengetahuan tentang relasi insani, salah satu tugas pokok pemimpin adalah memajukan dan mengembangkan semua bakat dan potensi anak buah, untuk bisa bersama-sama maju.
- d. Kejujuran, pemimpin yang baik itu harus memiliki kejujuran yang tinggi.
- e. Objektif, pemimpin itu harus berdasarkan hati nurani yang bersih supaya objektif (tidak subjektif berdasarkan prasangka sendiri).
- f. Dorongan Pribadi, keinginan dan kesediaan untuk menjadi pemimpin itu harus muncul dari dalam hati sanubari sendiri.
- g. Keterampilan berkomunikasi, pemimpin diharapkan mahir menulis dan berbicara.
- h. Kemampuan mengajar, pemimpin yang baik diharapkan mampu menjadi guru.
- i. Keterampilan social, pemimpin diharapkan mampu mengelola agar mereka dapat mengembangkan bakat dan potensinya.
- j. Kecakapan teknis dan kecakapan manajerial, pemimpin harus superior dalam suatu kemahiran tertentu.

Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan kelompok. Apabila ada saat muncul pemimpin, maka kemungkinan besar kelompok-kelompok tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Tidak munculnya seorang pemimpin tadi karena seorang individu yang diharapkan menjadi seorang pemimpin, ternyata tidak berhasil membuat jalan bagi kelompok untuk mencapai tujuannya dengan begitu kebutuhan warga tidak terpenuhi (Soekanto, 1990:320).

Karakteristik pemimpin yang berhasil memiliki sifat dan keterampilan tertentu. Cirinya antara lain dapat beradaptasi dengan situasi, peka terhadap lingkungan sosial, ambisius serta berorientasi pada hasil, tegas, dapat bekerja sama, meyakinkan, mandiri, mampu mempengaruhi orang lain, enerjik, tekun, percaya diri, tahan stres, dan memikul tanggung jawab. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin antara lain cerdas, tampil secara konseptual, kreatif, diplomatis, dan taktis, lancar berbahasa, memiliki pengetahuan terhadap tugas kelompok, mampu mengorganisasi, mampu memengaruhi dan meyakinkan, dan memiliki keterampilan (Rivai, 2006: 5).

Sifat-sifat yang disyaratkan bagi seorang pemimpin, tidaklah sama pada setiap masyarakat, walaupun tidak jarang ada persamaan disana-sini. Masyarakat Indonesia sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin adalah memberi kesenangan, mau bekerja, patuh, dan memberikan semangat pada anak buahnya (Soekanto, 1990:322).

Sifat yang diidentifikasi berhubungan erat dengan kepemimpinan adalah kecerdasan, kemampuan untuk bergaul dengan orang lain, keterampilan teknis

dalam bidangnya, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain, kestabilan emosi dan kontrol pribadi, keterampilan perencanaan dan pengorganisasian, keinginan yang kuat untuk menyelenggarakan kelompok, kemampuan untuk menggerakkan kelompok, kemampuan untuk berbuat secara efektif, efisien, dan tegas.

Efektivitas kepemimpinan dalam kaitannya dengan jumlah dan jenis kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin dan cara kekuasaan tersebut digunakan. Kekuasaan dilihat sebagai hal yang penting untuk memengaruhi bawahan, kawan sejawat, atasan, dan orang yang berada di luar organisasi seperti para pelanggan dan pemasok. Kekuasaan seorang pemimpin bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu kekuasaan berdasarkan posisi, kekuasaan personal, dan kekuasaan politik.

Kriteria kepemimpinan secara singkat dapat dikemukakan bahwa pemimpin yang efektif adalah jujur, vitalitas fisik dan mental, kecerdasan, kearifan, bertanggung jawab, kompeten, memahami kebutuhan pengikutnya, keterampilan interpersonal, kebutuhan untuk berprestasi, mampu memotivasi dan memberi semangat, mampu memecahkan masalah, meyakinkan, memiliki kapasitas untuk menang, memiliki kapasitas untuk mengelola, memutuskan, menentukan prioritas, mampu memegang kepercayaan, memiliki pengaruh, mampu beradaptasi atau memiliki fleksibilitas

3. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan

bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok atau organisasi. Fungsi pemimpin dalam suatu kelompok atau dalam suatu desa memiliki peranan yang sangat besar, karena pemimpin menjadi penentu dan pembimbing masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin laki-laki dan perempuan memiliki fungsi kepemimpinan yang sama.

Fungsi kepemimpinan pada dasarnya ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan memotivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalani jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan (Kartono, 2013:93).

Kemampuan mengambil keputusan merupakan kriteria utama dalam menilai efektifitas kepemimpinan maka berbagai kriteria seorang pemimpin menjalankan berbagai fungsi-fungsi kepemimpinan diantaranya :

- a. Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha mencapai tujuan.
- b. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak diluar organisasi.
- c. Pemimpin selaku komunikator yang efektif.
- d. Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan kedalam terutama dalam menganalisis situasi konflik.

- e. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral (Siagian,2010 :47-48).

Seorang pemimpin yang baik diharapkan dapat memahami segala aspek perilaku kepemimpinan dan mengetahui kapan fungsi kepemimpinan diperlukan. Pemimpin yang baik perlu memiliki tiga macam kesadaran, yaitu: *pertama*, sadar kapan pemimpin itu diperlukan dalam situasi tertentu, *kedua*, sadar akan perubahan tata nilai baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun dalam masyarakat, *ketiga*, sadar betapa pentingnya kepemimpinan yang efektif yang mampu menggerakkan orang lain bekerja seefektif mungkin (Rivai.2006:83).

4. Pola Kepemimpinan

Pola kepemimpinan diartikan sebagai suatu cara penampilan karakteristik tersendiri. Menurut Follet (dalam Nursalam,2007:46), pola didefinisikan sebagai hak istimewa yang tersendiri dari ahli dengan hasil akhir yang dicapai tanpa menimbulkan isu sampingan. Sedangkan menurut Gilles (dalam Nursalam, 2007:47) menyatakan bahwa pola kepemimpinan dapat diidentifikasi berdasarkan perilaku pemimpin itu sendiri. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh adanya pengalaman bertahun-tahun dan lama dalam kehidupannya oleh karena itu, kepribadian seseorang akan memengaruhi pola kepemimpinan yang digunakan. Pola kepemimpinan seseorang cenderung sangat bervariasi dan berbeda-beda.

Pola kepemimpinan adalah cara pemimpin dalam membawa dirinya sebagai pemimpin, cara berlagak dalam menggunakan kekuasaannya, misalnya pola kepemimpinan otoriter, demokratis, paternalistik (Rachmansyah, 2008:23).

Pola dilihat dari dua titik yaitu kepemimpinan berfokus pada atasan dan kepemimpinan berfokus pada bawahan. Pola tersebut dipengaruhi oleh faktor manajer, faktor karyawan, faktor situasi. Jika pemimpin memandang kepentingan organisasi harus didahulukan dibanding kepentingan individu, maka pemimpin akan otoriter, akan tetapi jika bawahan mempunyai pengalaman yang lebih baik dan menginginkan partisipasi, maka pemimpin dapat menerapkan pola partisipasinya (Nursalam, 2007:41).

Pola kepemimpinan akan terlihat dari tipe dan gaya yang digunakan seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah, akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Gaya kepemimpinan tersebut merupakan dasar mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut terbentuk perilaku kepemimpinan yang terwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari tiga tipe pokok kepemimpinan, yaitu:

a. Tipe Kepemimpinan Otoriter

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpin.

b. Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan

dengan memberikan keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpinnya mengfungsikan dirinya sebagai penasehat.

c. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok/organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran pendapat, kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dan dihargai disalurkan secara wajar. Tipe pemimpin ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin (Rivai, 2006: 56-57).

Kegagalan pemimpin dan kepemimpinan itu disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah pada tuntutan hati nurani rakyat, kurangnya menjalani interaksi terbuka dengan rakyat, maka dari itu kelompok sarjanawan membagi tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut:

a. Tipe Karismatis

Tipe ini memiliki kekuatan energy, daya tarik dan wibawah yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia memiliki pengikut yang sangat besar jumlahnya dan bias dipercaya.

b. Tipe Paternalis

Yaitu tipe yang kebabakan, dia menganggap bawa bawahannya belum dewasa atau anak sendiri.

c. Tipe Militeristis

Tipe ini sok kemiliter-militeran, namun hanya gaya luarnya saja yang militer, namun apabila dilihat seksama tipe ini lebih kepemimpinan otoriter.

d. Tipe Otokrasi

Tipe ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi.

e. Tipe Laissez Faire

Pemimpin praktis tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri.

f. Tipe Populistik

Kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat yang tradisional.

g. Tipe Administratif atau eksekutif

Tipe kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara eksekutif.

h. Tipe Demokrasi

Kepemimpinan demokrasi berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya terdapat koordinasi pekerja pada semua bawahan dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal dan kerjasama yang baik (Kartono,2013:80-86).

Tipe kepemimpinan di atas dalam praktiknya saling mengisi atau saling menunjang secara bervariasi, yang disesuaikan dengan situasinya sehingga akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif.

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan kesanggupan untuk berbuat baik, sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh pemimpin. Ada enam gaya yang dikemukakan Goelman diantaranya:

- a. Visioner, merupakan contoh gaya kepemimpinan yang mengangkat iklim emosi dan mengubah semangat organisasi di berbagai tingkatan, sebagai contoh pemimpin visioner mengartikan kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan membiarkan orang untuk berinovasi, bereksperimen dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan.
- b. Pembimbing, gaya kepemimpinan ini berfokus pada perkembangan perorangan, bukan pada pencapaian tujuan, tetapi pada umumnya gaya ini memprediksi adanya respon emosi yang positif dan hasil yang lebih baik.
- c. Afuliatif, yaitu gaya yang hanya berfokus pada pujian yang bisa membuat kinerja yang buruk berlangsung terus tanpa perbaikan dan pegawai bisa menganggap kesalahan bisa ditoleransi.

- d. Demokratis, gaya ini dibangun berdasarkan tri tunggal kemampuan kecerdasan emosi. Pemimpin seperti ini menciptakan perasaan bahwa mereka ingin sungguh-sungguh mendengarkan pikiran dan kepedulian pegawai dan mereka bersedia mendengarkan. Pemimpin seperti ini bukan hanya berorientasi sebagai pemimpin yang berada diatas namun juga merasakan bagai mana sebagai seorang anggota.
- e. Penentu kecepatan, merupakan gaya yang menghadapi tantangan dengan tujuan yang menarik, karena seseorang kali dilaksanakan secara buruk maka dampaknya sangatlah negative
- f. Memerintah, gaya ini digunakan untuk memerintah bawahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Gaya ini seringkali disalah gunakan oleh pemimpin maka dari itu penggunaan yang tepat adalah ketika suasana kritis untuk membangkitkan perubahan arah atau pada pegawai yang bermasalah (Goelman, 2006:65).

Keenam gaya di atas pada dasarnya tergantung pembawaan seorang pemimpin dalam memimpin bawahannya, gaya yang berbeda-beda dalam memimpin maka akan menghasilkan suatu pencapaian yang berbeda pula. Gaya yang digunakan pemimpin dapat mempengaruhi intensitas kedekatan dengan seorang bawahannya, jadi pada dasarnya gaya yang dipilih seorang pemimpin akan mempengaruhi hasil pencapaiannya.

Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah,

keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu:

- a. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas
- b. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama.
- c. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dipakai (Rivai,2006: 58).

Gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu gaya yang dapat memaksimalkan produktivitas, kepuasan kerja pertumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi. Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan.

5. Teori dan Teknik Kepemimpinan

Ruang lingkup atau tema kepemimpinan itu intinya meliputi masalah pokok yaitu teori kepemimpinan dan teknik kepemimpinan:

- a. Teori Kepemimpinan
 - 1) Suatu pengeneralisasian dari seri fakta mengenai sifat-sifat dasar dan perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinan.
 - 2) Dengan menekankan latar belakang historis dan sebab-sebab musabab timbulnya kepemimpinan serta persyaratan menjadi pemimpin

- 3) Sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin, tugas-tugas pokok dan fungsi, serta etika profesi yang perlu dipai oleh pemimpin

b. Teknik Kepemimpinan

- 1) Kemampuan dan keterampilan teknik pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan di tengah praktik dalam kehidupan dan dalam organisasi tertentu, dan
- 2) Melingkupi konsep-konsep pemikirannya, perilaku sehari-hari serta peralatan yang digunakan (Kartono.2013:3).

6. Kepemimpinan Perempuan

Istilah perempuan dapat dipandang dari beberapa konsep misalnya seks (jenis kelamin) yang memandang perempuan secara biologis dan konsep gender yang memandang perempuan secara konstruksi sosial. Menurut jenis konsep konsep, jenis kelamin adalah persifatan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, yakni bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut: memiliki Penis, memiliki jakala (kala menjing), dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, mereproduksi telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya, dalam artian tidak dapat dipertukarkan dan sudah menjadi kodrat Tuhan.

Perempuan adalah pelaku ekonomi yang aktif, Petani yang gigih, perawat keluarga yang handal. Mereka tidak mengharap imbalan, karena tujuan

utamanya adalah supaya kebutuhan sosial, ekonomi, dan pendidikan anak terpenuhi (Sunarijati dkk, 2000:61-62).

Dari beberapa konsep pengertian tentang perempuan dan laki-laki yang diungkapkan beberapa tokoh, maka timbul perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara alami (biologis) dalam berbagai konteks budaya seringkali mendasari deferensiasi peran (*divison of labor*) yang ada. Akibatnya sering terjadi ketidak seimbangan peran antara laki-laki dan perempuan yang dalam beberapa kasus dapat memunculkan adanya dominasi laki-laki dan perempuan.

Di kalangan masyarakat kuatnya pengaruh budaya patriarki yang membedakan anatara kekuasaan laki-laki dengan perempuan yang didasarkan pada peran gender tradisional, masih tetap melingkupi berbagai aspek kehidupan yang ada. Meskipun gerakan emansipasi telah mampu menjadi lokomotif penggerak masuknya peran ke berbagai sektor publik (pendidikan, ekonomi, industri) namun, kenyataan yang ada masih memperlihatkan bahwa diantara mereka banyak yang hanya terlibat pada bidang-bidang yang merupakan kepanjangan dari peran gender tradisional.

Pola pengasuhan terhadap perempuan juga masih didominasi dengan penekanan pada peran dan pembagian kerja berdasarkan gender. Oleh sebab itu, bila perempuan melakukan tindakan berbeda dengan apa yang diharapkan masyarakat, mereka dicap sebagai aneh, abnormal, bertingkah laku menyimpang. Di Indonesia perlakuan terhadap perempuan yang melakukan tindakan berbeda juga dianggap aneh dan menyimpang (Sihite, 2007:6).

Perempuan yang dipandang sebelah mata sudah saatnya mulai dari sekarang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama seperti laki-laki baik dalam memimpin, bekerja ataupun memperoleh pendidikan. Kepemimpinan seorang perempuan sekarang ini bukan suatu hal yang aneh, karena sudah banyak perempuan memimpin baik dalam dunia politik maupun non politik.

Kepemimpinan kepala desa perempuan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja para bawahannya dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan kualitas masyarakatnya. Sebagai pemimpin, kepala desa mempunyai tugas utama memimpin masyarakat.

Dalam kepemimpinan perempuan menurut Carol A. O'Connor (1996: 30-31) memiliki kelebihan dan kelemahan dalam memimpin bawahannya yaitu sebagai berikut:

a. Kelebihan

- 1) Perempuan identik dengan sifat kelembutan, ketenangan, dan kerendahan hati. Sifat yang dimiliki perempuan tentu berbeda dengan sifat yang dimiliki laki-laki, hal ini yang dapat menjadikan ciri perempuan dalam memimpin bawahannya yakni kerendahan hati yang dimiliki akan menimbulkan kesan nyaman terhadap bawahannya yang dipimpinnya karena pemimpin tersebut dapat menempatkan diri di mana pun berada dan tidak merasa ada perbedaan antara bawahan dengan atasan, ketenangan dalam berfikir dan menyelesaikan persoalan dapat menjadi salah satu kelebihan seorang pemimpin perempuan setiap

persoalan tidak akan pernah selesai jika tidak ditanggapi dengan ketenangan berpikir, sifat lembut yang dimiliki perempuan pada umumnya dapat menimbulkan suasana kerja yang kondusif karena perintah-perintah yang diberikan dan saran yang diberikan untuk bawahannya selalu disampaikan dengan tutur kata yang halus.

- 2) Memiliki sifat analisis dan hati-hati, bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang nantinya digunakan sebagai kebijakan desa maupun untuk masa depan desa yang dipimpinnya, menganalisis setiap persoalan yang dihadapi bawahannya maupun masalah pribadi dalam kehidupannya sebelum mengambil keputusan menjadi salah satu tolok ukur kepemimpinannya.
- 3) Lebih memahami dan mengerti apa yang diinginkan bawahannya. Saran dan kritik yang diberikan bawahan pada atasannya harus selalu diterima dengan lapang dada dan diberi umpan balik guna memotivasi kinerja bawahan. Mengerti dan memahami apa yang diinginkan bawahan pada saat bekerja, misalnya seorang bawahan menginginkan atasan lebih bersikap responsive terhadap kinerja yang dilakukan guru maka pemimpin harus memahami hal tersebut.

b. Kelemahan

- 1) Kepercayaan diri yang cenderung kurang

Dukungan dari bawahan juga sangat penting untuk kemajuan seorang pemimpin karena bawahan lebih tahu bagaimana sifat dan cara dipimpinnya, oleh karena itu tidak jarang seorang pemimpin kurang

percaya diri dalam memimpin suatu lembaga karena kurangnya support/dukungan dari bawahan untuk kemajuan organisasi yang dipimpinnya tersebut dan hal ini dapat berakibat buruk untuk perkembangan bawahan dalam bekerja dan untuk organisasi yang dipimpin tersebut. Hal ini ternyata menjadi salah satu kelemahan seorang perempuan dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah.

- 2) Kurang berani atau kurang tegas dalam mengambil keputusan.
- 3) Sifat analisis dan hati-hati dalam mengambil setiap keputusan biasa menjadi salah satu kelebihan seorang pemimpin perempuan namun analisis yang sudah tepat dipilihnya tersebut kurang tegas diucapkan di hadapan bawahannya, pengambilan keputusan yang tegas dapat mencerminkan seorang pemimpin akan kewibawaan yang dimilikinya.
- 4) Kadang muncul sifat otoriter, misal: mendikte tugas bawahan dan teman sekerja. Sifat otoriter dan mendikte kadang bisa muncul dalam sebuah organisasi kepemimpinan karena seorang bawahan tidak semuanya bisa mengikuti jalan pikiran atasannya oleh karena itu ada juga bawahan yang tidak patuh terhadap perintah atasa, hal inilah yang menimbulkan sifat otoriter seorang pemimpin kadang muncul dan mendikte tiap tugas yang dilakukan bawahannya karena ketidakpatuhan bawahan terhadap atasan.

B. Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 2 disebutkan “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 83 mengatur tentang Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi:

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;

- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
4. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
 5. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (UU No 6, Tahun 2014 Pasal 83 Bab IX).

Pembangunan adalah suatu usaha atas rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *nation-building* (Siagan, 1980: 2-3).

Konsep pembangunan menurut Meier 1989 (dalam Marzali, 2005:62) sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi maka dilihat dari sudut ilmu ekonomi pembangunan berarti suatu proses dimana *real per income* dari suatu Negara meningkat dalam suatu panjang, dan dalam masyarakat bersamaan jumlah penduduk yang dibawah garis kemiskinan tidak bertambah, dan distribusi pendapatan tidak makin senjang.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang peka gender, karena pembangunan yang tidak peka gender sering membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perempuan. Sudah waktunya perempuan mulai diperhitungkan didalam pembangunan baik dalam partisipasinya maupun dalam ketenagakerjaan (Sihite, 2007:107).

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa

merusak lingkungan atau kehidupan sosial. Dan merupakan sebuah transformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang digerakkan atas tujuan atau strategi yang diinginkan yang berguna untuk peningkatan kualitas manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Agar pembangunan di desa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan desa yang sesuai maka akan terciptanya pembangunan desa yang lebih maju.

Pembangunan desa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dan kemajuan suatu desa harus dikerjakan secara bersama-sama oleh masyarakat yang ada di desa tersebut, namun terdapat pembagian bidang tersendiri dalam pembangunan desa agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 123 disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas beberapa bidang diantaranya: (1) bidang penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, (2) bidang pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu, (3) bidang penguatan kapasitas masyarakat, (4) bidang kelembagaan dan kemitraan ekonomi, (5) bidang pembangunan infrastruktur antar perdesaan (PP No 43 Tahun 2014 Pasal 123 Bab VII).

C. Kepala Desa

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah

administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa atau pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan setelah itu dapat dipilih duakali lagi untuk masa jabatan berikutnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa yang dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan pelaporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No 6, Tahun 2014 Pasal 19 Bab IV).

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. membina kehidupan masyarakat Desa
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. memanfaatkan teknologi tepat guna
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No 6, Tahun 2014 Pasal 26 Bab V).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa atau pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih satu kali lagi untuk masa jabatan berikutnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.

Kepala desa yang dijadikan pemimpin didalam sebuah desa berdasarkan pilihan secara demokrasi oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Pada dasarnya kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan dari pemerintah dan

melayani kepentingan masyarakat. Kepala desa harus benar-benar memiliki tanggung jawab dan peran aktif yang besar terhadap masyarakatnya.

Pentingnya tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga yang diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang dilembannya. Dapat disimpulkan bahwa kepala Desa dituntut harus mampu mengembangkan kepemimpinannya (*leadership*), mampu menggerakkan desanya, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya. Kepala desa perempuan memberi banyak pengaruh positif terhadap warga dan kemajuan Desa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tanggung jawab dan perjuangannya dalam memimpin desa agar dapat menjadi desa yang maju. Bantuan dan perbaikan dalam bidang ekonomi, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat juga telah dilakukan.

Perjuangan kepala desa perempuan mempunyai maksud untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Selain itu, kepala desa perempuan juga tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Kepala Desa perempuan dapat melakukan peran ganda sebagai Kepala Desa dan ibu rumah tangga secara baik dan seimbang. Kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin (*leader*) turut ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut harus mampu mengembangkan kepemimpinannya (*leadership*), mampu menggerakkan desanya, untuk mencapai keberhasilan

pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desanya serta harus cakap dalam mewujudkan visi dan misi yang diembannya.

D. Pelayanan kepada Masyarakat

Pelayanan berkaitan erat antara hubungan seseorang yang satu dengan seseorang yang lain dan tolak ukur dari pelayanan adalah kepuasan dari seseorang tersebut apakah pelayanan yang diterima sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Pelayanan menjadi kunci utama dalam sebuah keberhasilan pemimpin.

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi didalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sinambela,2010:5).

Secara etimologis pelayanan berasal dari kata layanan yang bearti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai perihal atau cara melayani servis atau jasa, dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu menyaipkan dan mengurus baik itu berupa barang tau jasa dari suatu pihak kepada pihak yang lain (Hardiansyah, 2011:10).

Pelayanana merupakan hal yang menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, tidak yang sukar diukur dan disentuh secara eksak, sensitif dan sukar diprediksi serta sangat tergantung pada nilai yang dianggap pantas oleh pelangan terhadap apa yang diterima terhadap apa yang sudah dibayarkan, hal ini diungkap oleh Ibrahim (dalam Handoyo, 2013).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu pihak, maka dari itu pelayanan harus dilakukan atas kebutuhan dari pihak yang diberi pelayanan tersebut.

Pelayanan berkaitan erat dengan pelayanan terhadap masyarakat atau Publik. Publik merupakan suatu hal yang berkaitan dengan orang banyak maka dari itu segala kebutuhan dan kepentingan harus diutamakan atau didahulukan. Istilah publik yang berarti umum, masyarakat, negara (Sinambela, 2010:5).

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pada Pasal 1 tentang Pelayanan Publik, mengartikan pelayanan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan dari pelayanan pada umumnya adalah dapat memuaskan masyarakat tanpa memandang apapun. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dituntut kualitas prima yang tercermin sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu penyelenggaraan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
2. Akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kondisional, yaitu penyelenggaraan yang sesuai dengan kondisi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
4. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat
5. Kesamaan hak, yaitu penyelenggaraan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya ras, suku, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antar pemberi dan penerima pelayanan publik (Winarsih, 2007:18-19).

Sebagai sebuah pelayanan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat maka pelayanan publik dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada prinsip atau asa: (1) kepentingan umum, (2) kepentingan hukum, (3) kesamaan hak, (4) keseimbangan hak dan kewajiban, (5) profesional, (6) partisipatif, (7) persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, (8) terbuka, (9) akuntabel, (10) perlakuan khusus bagi yang lemah, (11) tepat waktu, (12) cepat mudah dan terjangkau (Wibawa, 2012:60).

Pelayanan publik didalamnya terdapat beberapa unsur diantaranya: (1) organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah daerah, (2) penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau orang yang

berkepentingan, (3) kepuasan yang diberikan dan diterima oleh penerima layanan (Hardiyansyah, 2011:12).

Komponen-komponen yang menjadi kriteria pelayanan publik adalah : (1) kegiatan pemberian pelayanan, (2) oleh penyelenggara pelayanan pemerintah, korporasi, lembaga, dan independen, (3) berupa barang atau jasa, (4) kepada masyarakat atau publik, (5) agar mereka puas (Handoyo, 2013:17).

Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas. Kualitas pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan yang baik yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan. Sebagaimana dikemukakan oleh Trigono (dalam Hardiyansyah, 2011:94) bahwa pelayanan yang terbaik adalah melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan.

Pelayanan terhadap pelayanan publik secara kompherensif, secara singkat ditunjukkan pada:

1. Nilai kepuasan yaitu menunjukkan pada tingkat dimana pelayanan pemerintah dapat dengan mudah diakses dan tersedia untuk warga Negara
2. Nilai keamanan yaitu, menunjuk pada tingkat dimana layanan disediakan pada kondisi yang membuat warga Negara merasa aman dan percaya untuk memakainya
3. Taksiran realibilitas yaitu menunjuk pada tingkat dimana pelayanan pemerintah disediakan dengan benar dan tepat waktu

4. Perhatian personal, yaitu menunjukkan pada tingkat dimana pegawai mampu menyampaikan informasi kepada warga Negara dan pekerja dengan membantu memenuhi kebutuhan warga Negara
5. Pendekatan penyelesaian masalah yaitu menunjukkan pada tingkat dimana pegawai membantu warga Negara untuk mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi
6. Nilai kejujuran yaitu menunjukkan pada tingkat dimana warganegara percaya bahwa pelayanan yang disediakan pemerintah disediakan secara berkeadilan untuk semua
7. Nilai pengaruh warganegara, yaitu menunjukkan pada tingkat dimana warganegara dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah local atau pemerintah daerah (Dwiyanto, 2008:38).

Pelayanan publik atau pelayanan masyarakat pada dasarnya dilakukan atas dasar kepuasan, puas karena dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dan puas karena masyarakat diberi pelayanan.

Pelayanan masyarakat di desa maupun di kota pada dasarnya sama, sama-sama melayani masyarakat umum. Pelayanan dan masyarakat sama-sama memiliki hak dan kewajiban didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang

Desa ada beberapa hak dan kewajiban desa dan masyarakat diantaranya:

1. Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
3. Masyarakat Desa berhak:
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
4. Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (UU No 6, Tahun 2014 Pasal 67 Bab VI).

Setelah masyarakat melakukan kewajibannya masyarakat berhak menerima haknya, dan begitu juga desa berhak melayani masyarakat tersebut dengan tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, semua sama dan mendapatkan hak yang sama, dengan catatan masyarakat tersebut sudah melakukan kewajibannya sebagai masyarakat desa.

Pelayanan yang diberikan tidak membedakan masyarakat tersebut dari kalangan atas maupun bawah semua memiliki hak yang sama mendapat pelayanan yang baik dan memuaskan. Pelayanan masyarakat sangat dibutuhkan diberbagai daerah bukan hanya saja di kota namun juga di desa semuanya sama-sama membutuhkan pelayanan yang baik dan tidak membeda-bedakan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini dipaparkan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pola kepemimpinan kepala desa perempuan dalam meningkatkan pembangunan.

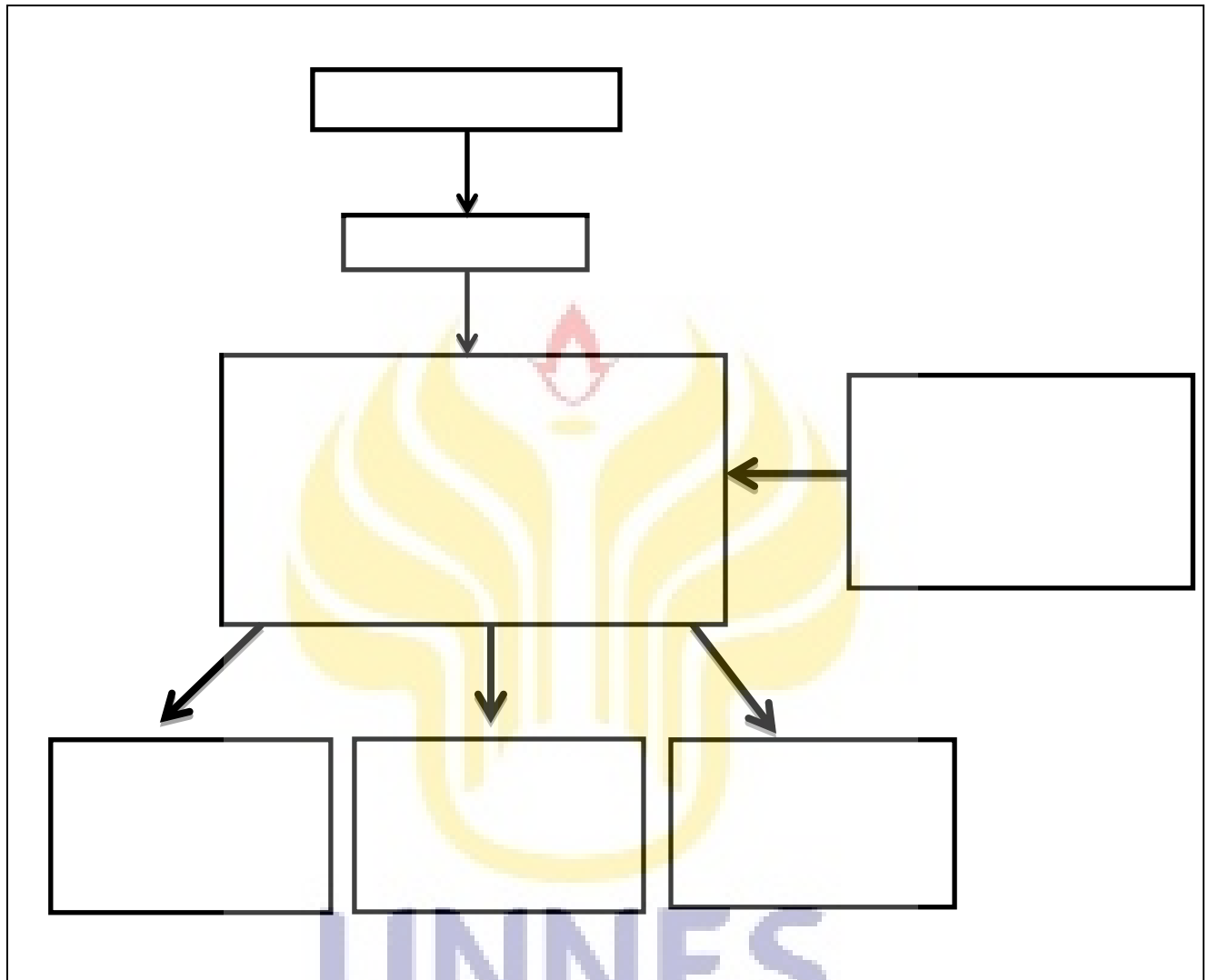
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana (2013:104) menunjukkan bahwa (1) peran kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat sudah memberikan kemajuan terhadap Desa Karas Kepoh. Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa perempuan sudah berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, berperan sebagai motivator yang memotivasi bawahan dan masyarakat untuk dapat mengikuti kegiatan pembangunan. Peran tersebut dibuktikan dengan berdirinya bangunan jembatan gantung, akses jalan raya dan bangunan pusat layanan internet masyarakat, (2) peran kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pola kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan suatu desa dan adanya rasa ketidakpercayaan beberapa masyarakat terhadap pola kepemimpinan seorang kepala desa perempuan.

F. Kerangka Berfikir

Kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan tampaknya semakin meningkat, baik di bidang politik, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraannya. Perempuan yang berperan dalam pembangunan tidak hanya perempuan yang ada dikota, melainkan perempuan yang berada diberbagai lini kehidupan juga ikut berperan. Salah satunya yaitu Kepala Desa, tidak sedikit Kepala Desa perempuan yang lebih berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kedudukan dan peranan laki-laki dengan perempuan dalam pembangunan. Pengaruh utama gender dari pemerintah merupakan salah satu kunci untuk membantu mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat serta meningkatkan partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumber daya pembangunan.

Dari uraian di atas mengenai kerangka berfikir dapat digambarkan dalam



bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir yang Dikembangkan dalam Penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pola kepemimpinan yang diterapkan kepala Desa Senden dalam meningkatkan pembangunan kepala Desa Senden menerapkan pola kepemimpinan yang demokratis hal ini terlihat dari cara kepala desa dalam melakukan tahap perencanaan dengan musyawarah yang meliputi musyawarah dusun dan musyawarah desa musyawarah dilakukan dengan masyarakat dan juga perangkat desa secara bersama-sama untuk merencanakan program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kepala desa melaksanakan tahap pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat dengan melibatkan semua masyarakat di Desa Senden agar tidak terjadi keterlambatan dalam melaksanakan. Tahap evaluasi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan juga masyarakat terkait untuk mencari jalan keluar mengenai apa saja yang menjadi penghambat jalannya pembangunan pada tahap evaluasi ini juga akan dipaparkan laporan pertanggung jawaban program kegiatan. Begitu juga dalam membuat peraturan kepala desa melakukan musyawarah secara bersama-sama untuk menyepakati peraturan yang dibuat. Peraturan yang dibuat bukan hanya mengatur perangkat desa namun juga kepala desa sendiri.

2. Kepemimpinan kepala desa perempuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan baik dan tidak membedakan pelayanan yang diberikan hal ini terlihat dari cara kepemimpinana kepala desa dalam melayani masyarakat dilakukan secara terbuka dan diberikan 24 jam agar semua pelayanan masyarakat dapat terlayani, dalam melayani masyarakat kepala desa melakukan pembagian tugas dengan perangkat desa untuk melayani masyarakat yang tujuannya agar pelayanan terhadap masyarakat cepat terlayani dan mengantisipasi terjadinya kesalahan, selain itu kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan pelayanan yang diberikan berdasarkan status, golongan dan urusan pribadi semua masyarakat diberikan pelayanan yang sama dan dilakukan secara terbuka.
3. Tanggapan masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala desa perempuan sebagian besar masyarakat desa Senden memberikan tanggapan yang positif terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Senden. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan Desa Senden selama kepemimpinan kepala desa perempuan khususnya kemajuan dibidang pembangunan. Kepala desa dalam memimpin juga melibatkan semua masyarakat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Selain itu kepala desa Senden memprioritaskan kebutuhan masyarakat khususnya dalam program pembangunan seperti pembangunan jalan usaha tani (JUT), selokalisasi pembuatan tanggul dan pembuatan jembatan penghubung. Program pembangunan yang dibuat kepala desa berdasarkan

kebutuhan masyarakat banyak bukan kepentingan pribadi atau golongan. Repon positif dari masyarakat tentang kepemimpinan kepala desa juga ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat Desa Senden dalam menjalankan program pembangunan dan kegiatan yang ada di Desa Senden.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat ditemukan antara lain:

1. Bagi Kepala Desa, diharapkan kepala desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang ada di desa Senden dengan cara memberikan penghargaan kepada setiap dusun yang partisipasi masyarakatnya tinggi, dan kepala desa seharusnya melakukan koordinasi rutin kepada seluruh ketua RT, RW dan kepala dusun untuk membantu mengerakkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada di Desa Senden.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjalin kerjasama antar warga dan pemerintah desa atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di dalamnya agar semua keinginan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan cara mengikuti musyawarah yang diadakan di desa dan menyampaikan usulanya. Masyarakat diharapkan lebih memahami dan ikut serta berpartisipasi terhadap kegiatan yang ada di desa dalam kegiatan pembangunan khususnya demi kemajuan Desa Senden.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armin Rahmansyah. 2004. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi di Indonesia*. Magister Ekonomi Pembangunan. USU Medan.
- Goelman, Daniel dkk. 2006. *Kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi Indikator dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Handoyo, Eko. 2013. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jalaludin, Rahmat. (2011) *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1967. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakjat.
- Lutfiana, Nana.2013. *Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Karas Kepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Marzali, Amri. | 2005. | *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nursalam. 2007. *Manajemen Keperawatan Aplikasi dan Praktik Keperawatan Profesional*. Salemba Medika: Jakarta.

- O'Connor, Carol A. 1996. *Kepemimpinan Yang Sukses Dalam Sepekan*. Jakarta: Kesaint Blanc
- Rachman, Maman. 2011 *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Campuran, Tindakan dan Pengembangan*. Semarang: UNNES PRES
- Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 1980. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Renika Cipta
- Sinambela, Lijan Pitaloka dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Yeori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan Kesetaraan Keadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subhan Zaitunah, 2004. *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sunarijati, Ari dkk. 2000. *Perempuan yang Menuntun*. Bandung: Ashoka Indonesia.
- Undang-Undang Nomor No. 43 Tahun 2014 Tentang desa
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Wahjosumidjo. 2003. *Kepemimpinan kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan*

Permasalahannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Wibawa, Samodra. 2012. *Mengelola Negara: Pemuda untuk Buati, Gubernur, dan Presiden*. Yogyakarta: Gava Media

Winarsih, Atik Septi dkk. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

